

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SISTEM ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) (Studi Kasus di PT Centralpertiwi Bahari)

Oleh

Deo Vita Effendi

Permasalahan kebijakan *outsourcing* yang terdapat di PT Centralpertiwi Bahari Kabupaten Lampung Selatan masih ada hingga saat ini. Masalah tersebut di antaranya adalah: pertama, perusahaan mempekerjakan buruh dengan status *outsourcing* menempati bagian-bagian yang langsung dengan produksi atau kegiatan pokok dalam perusahaan. Kedua, masalah yang juga sering dilanggar oleh pengusaha dalam hal melakukan perpanjangan kontrak kerap melebihi waktu berakhirnya masa kontrak sebelumnya. Ketiga, perusahaan juga mendirikan pusat pelatihan dan merekrut tenaga kerja dengan tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sementara pekerja ditempatkan layaknya buruh biasa yang juga menghasilkan barang produksi di PT Centralpertiwi Bahari. Banyak buruh yang salah dalam memandang karena seolah-olah perusahaan baik dengan memberikan sarana pendidikan dan pelatihan gratis, padahal bila ditelusuri lebih dalam maka akan terlihat tidak adanya komunikasi yang baik antara para pengusaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kebijakan sistem alih daya *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kebijakan sistem *outsourcing* di PT Centralpertiwi Bahari belum efektif. Dalam pelaksanaannya PT Centralpertiwi Bahari masih banyak kekurangan salah satunya dalam hal pengawasan atas pemenuhan syarat-syarat *outsourcing* yang sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu dalam praktek penerapan sistem *outsourcing* di dalam perusahaan juga banyak yang menyimpang. Praktik sehari-hari dalam *outsourcing* PT Centralpertiwi Bahari selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja tidak tetap/kontrak, upah lebih rendah, tidak ada jaminan sosial, tidak adanya kesejahteraan untuk pekerja, serta tidak adanya jaminan pengembangan karier selain itu perjanjian kontrak yang disepakati kedua belah pihak banyak dilanggar oleh perusahaan.

Kata kunci: Efektivitas Kebijakan, Praktek Kebijakan *Outsourcing*